



# Buletin Parlementaria

Nomor 1195/III/IV/2022 • April 2022



## DPR Setujui RUU TPKS Menjadi UU



**3** Rahmat Gobel  
Dorong Pemuda  
Indonesia Jadi  
Pengusaha



**5** Pimpinan DPR  
Komitmen Salurkan  
Aspirasi Tuntutan  
Mahasiswa ke Presiden



9 772614 339005

# DPR Setujui RUU TPKS Menjadi UU



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima dokumen pandangan pemerintah terhadap RUU TPKS dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Foto: Naifuroji/mvl

**R**ancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disetujui menjadi undang-undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Di hadapan para Anggota Dewan, perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil yang hadir, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menanyakan persetujuan seluruh Anggota Dewan terhadap RUU TPKS menjadi UU.

“Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan sebagai undang-undang?” tanya Puan sebelum mengetuk palu pimpinan saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa

(12/4). Pertanyaan tersebut disambut jawaban ‘setuju’ oleh seluruh Anggota Dewan. Sebelum disetujui, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyampaikan laporan pembahasan RUU TPKS.

Bahkan terlihat beberapa Anggota Dewan perempuan berdiri untuk memberikan apresiasi pada persetujuan RUU tersebut. Puan mengungkapkan, persetujuan RUU ini juga merupakan hadiah bagi perempuan Indonesia, terutama menjelang peringatan hari Kartini. Bahkan, persetujuan RUU TPKS juga menjadi hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa karena merupakan hasil kerja sama dan komitmen bersama. Politisi PDI-Perjuangan itu berharap nantinya implementasi UU TPKS dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

“Kami berharap bahwa implementasi dari undang-undang ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Karenanya perempuan Indonesia tetap dan harus selalu semangat!” tandas Puan.

Puan juga mengungkapkan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU TPKS hingga disahkan menjadi UU. “Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut,” tutup mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. ■ uc/sf





# Rachmat Gobel Dorong Pemuda Indonesia Jadi Pengusaha

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel dalam sambutannya di acara milad Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) bahwa para pemuda-pemuda Indonesia harus merubah *mindset* menjadi pengusaha, karena Indonesia membutuhkan generasi pengusaha.

“Indonesia membutuhkan pengusaha, dimulai dari pemuda diharapkan bisa menjadi pengusaha. Untuk saat ini pemerintah sedang terus mendorong UMKM untuk para pemuda untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh

pemerintah untuk membangun jati dirinya sebagai *entrepreneur* yang handal,” kata Gobel usai menghadiri acara milad SEMMI ke-66th, di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Minggu (10/4).

Menurutnya, saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi. “Sekitar 70,72 persen berada pada usia produktif. Rata-rata usia penduduk Indonesia sekitar 28-29 tahun. Jadi ini momentum yang sangat bagus untuk menggenjot ekonomi,” ungkap Gobel.

Politisi Partai NasDem itu menyatakan, Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Mulai dari flora, fauna, rempah, pertanian dan perkebunan, hingga hasil lautnya. Untuk itu jangan disia-siakan dengan kekayaan bumi Indonesia. “(Indonesia) kaya sumber daya alam. Tanahnya subur, kaya aneka ragam flora dan fauna. Laut kita juga kaya,” kata Gobel. ■ azk/sf



Wakil Ketua DPR RI  
Rachmat Gobel.  
Foto: Azka/nvl



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemerintahan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Inanidi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firista Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitomput, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Temui PMI Arab Saudi, Gus Muhaimin Apresiasi Seluruh Pahlawan Devisa



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar berfoto bersama dengan PMI di Arab Saudi. Foto: Ist/nvl

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar bersilaturahmi dan buka puasa bersama dengan puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermukim di Arab Saudi, di Qainas Mekkah, baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Gus Muhaimin menyampaikan rasa apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh pahlawan devisa Indonesia tersebut.

“Silaturahmi harus senantiasa kita jaga karena merupakan pilar dari ketahanan nasional kita. Semangat persaudaraan, kecintaan pada tanah air, gotong royong dan solidaritas sesama anak bangsa merupakan kunci dari ketahanan nasional kita,” ujar Gus Muhaimin dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Senin (11/4).

Di depan para Pekerja Migran Indonesia, Gus Muhaimin menyampaikan bahwa pasca-pandemi Covid-19, kondisi ekonomi Indonesia semakin membaik. Menurutnya momentum perbaikan ekonomi ini harus diikuti dengan upaya serius pemerintah

”

**SEMANGAT  
PERSAUDARAAN,  
KECINTAAN PADA TANAH  
AIR, GOTONG ROYONG  
DAN SOLIDARITAS  
SESAMA ANAK BANGSA  
MERUPAKAN KUNCI  
DARI KETAHANAN  
NASIONAL KITA**

untuk mengatasi ketimpangan yang masih tinggi. “Kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita masih tidak adil, yang menunjukkan bahwa ekonomi kita masih didikte oleh segelintir orang,” ujar Gus Muhaimin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa ekonomi Indonesia harus dibangun secara berkeadilan. Yaitu, dengan prinsip utamanya memajukan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Ia menyatakan implementasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah mandat konstitusi yang harus menjadi panduan pembangun ekonomi nasional.

“Selama ini pasal 33 belum menjadi panduan pembangunan ekonomi kita. Saya memandang bahwa kunci keberhasilan pembangunan nasional kita terletak pada pelaksanaan pasal 33, khususnya ayat 3 UUD 1945. Karena hal ini membuat ekonomi kita mengabdikan ke kemakmuran rakyat, bukan ke segelintir orang,” tegas Gus Muhaimin lebih lanjut.

Ketua Penyelenggara Silaturahmi, Maksud Jalal dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan Gus Muhaimin Iskandar bersilaturahmi dengan PMI yang bermukim di Arab Saudi. ■rdn/sf



Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Lodewijk F. Paulus saat menemui massa aksi yang tergabung dalam aliansi BEM SI. Foto: Tim/rvi

# Pimpinan DPR Komitmen Salurkan Aspirasi Tuntutan Mahasiswa ke Presiden

**P**impinan DPR RI menemui massa aksi yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Kompleks Parlemen. Pimpinan DPR tersebut yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Lodewijk F. Paulus. Dalam orasinya di atas mobil

komando, Dasco menekankan DPR akan menampung aspirasi massa, terutama terkait penolakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

“Kami berkomitmen menyampaikan ke pemerintah tuntutan mahasiswa akan kami sampaikan kepada pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya,” kata

Dasco dalam orasinya yang disambut tepuk tangan dari seluruh mahasiswa, di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Dasco menekankan di depan massa aksi, bahwa DPR dan MPR RI telah sepakat untuk tidak melakukan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan perintah konstitusi. “Yang paling penting adalah DPR RI dan MPR RI tidak akan melakukan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak sesuai dengan konstitusi tidak akan dilanjutkan,” tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini juga menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan Pemerintah soal waktu Pemilu yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Dasco menekankan tidak ada penundaan Pemilu. “DPR RI, KPU dan pemerintah bersepakat untuk menjalankan pemilu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tidak akan ada penundaan,” tegasnya. ■ rdn/sf



# Komisi I Harap BAKTI Segera Luncurkan Satelit Baru di Tahun 2023



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin kunjungan kerja spesifik Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI ke Sumatera Utara. Foto: Nadya/nvl

**K**etua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid berharap program yang sudah digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), khususnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk penyelenggaraan satelit baru di tahun 2023 dapat cepat terlaksana. Mengingat penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia yang sudah cukup padat ditambah dengan beragam konten yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Meutya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan

Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI dengan Direktur Utama BAKTI Anang Latif, tentang Program Penyediaan Akses Internet di Sumatera Utara, Jumat (8/4).

“Nampaknya dengan penggunaan internet yang sudah cukup padat dan konten-konten yang sekarang tidak lagi teks, video dan lain-lain, memerlukan *bandwidth* yang lebih besar. Dan ini kelihatannya yang dilakukan *bandwidth*-nya sudah cukup penuh yang dilakukan oleh BAKTI. Yang digunakan secara gratis oleh masyarakat, baik itu tenaga

kesehatan, maupun juga murid-murid di sekolah-sekolah. Jadi kita harapkan nanti dengan beroperasinya satelit yang baru nanti Insha Allah kendala-kendala itu bisa tertangani,” jelas Meutya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPR RI mendapatkan penjelasan Direktur Utama BAKTI tentang Program Penyediaan Akses Internet di Sumatera Utara merujuk pada Peta Digital 2021-2024. Selanjutnya, Tim Panja mendukung BAKTI untuk terus melakukan langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam mengantisipasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan akses internet bagi masyarakat terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pengembangan usaha.

“Komisi I sedang membuat Panja untuk dukungan internet, pemerataan internet yang dilakukan oleh Kominfo, khususnya oleh BAKTI di seluruh Indonesia. Jadi ini dalam rangka menyerap masukan untuk Panja, sebetulnya pelaksanaannya sudah seperti apa, kalau ada kendala, kendalanya seperti apa? Termasuk misalnya dukungan-dukungan anggaran. Misalnya, diperlukan lebih banyak titik, berarti kita juga

”

**JADI KITA HARAPKAN  
NANTI DENGAN  
BEROPERASINYA SATELIT  
YANG BARU NANTI  
INSHA ALLAH KENDALA-  
KENDALA ITU BISA  
TERTANGANI**

harus memikirkan tidak hanya fungsi pengawasan tapi fungsi penganggarannya seperti apa. Dan kami akan ke beberapa titik, Sumatera Utara salah satunya. Jadi kita akan lihat bagaimana juga di titik-titik lain untuk menjadi masukan bagi Panja,” tutur politisi Partai Golkar itu. ■ ndy/sf

# Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Akses Internet oleh BAKTI Sulsel Sudah Sangat Baik



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono memimpin pertemuan Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI dengan BAKTI Kominfo Sulsel. Foto: Kiki/nvl

**W**akil Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI, ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Kristiono menilai pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses internet yang dilakukan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Selatan sudah sangat baik.

“Menurut saya (penyediaan internet) untuk Sulawesi Selatan ya kalau dibandingkan daerah lain berada di Timur Indonesia, saya kira sudah sangat maju ya, sudah terdukung,” kata Bambang usai memimpin pertemuan

Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI dengan jajaran BAKTI Kominfo Sulsel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/4).

Bambang menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya, BAKTI Kominfo tidak lepas dari menjalankan fungsi, peran dan tugasnya yakni melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelaksanaan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Saat ini, BAKTI memiliki empat layanan publik, seperti penyediaan Akses Internet, Penyediaan BTS, Palapa Ring dan Satelit Multifungsi.

Kendati demikian, kata politisi Partai Gerindra itu, BAKTI Kominfo masih mempunyai pekerjaan rumah yang besar, yakni membersihkan konten-konten

negatif yang tersebar di masyarakat melalui media internet. Saat ini, masih maraknya konten-konten pornografi dan judi *online* yang dapat merusak mental dan sikap masyarakat, khususnya pada generasi-generasi penerus bangsa.

“Jadi tinggal sekarang ini bagaimana memilah dan memilih semua konten yang tersedia di internet, saya kira sudah di tahap itu. Karena kita mendengar dari berbagai diskusi maupun paparan yang diberikan terlihat sekali bahwa dampak negatif ini juga harus kita waspadai dan sekaligus kita hindari serta kita atasi, karena ternyata sangat besar ya pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di setiap harinya, saya kira itu yang harus kita antisipasi,” kata legislator dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut. ■ qq/sf

# Komisi III Imbau Polda Banten Tetap Siaga Mengamankan Lalu Lintas Mudik

**S**alah satu persoalan yang menarik perhatian yang terjadi di Provinsi Banten adalah besarnya antusiasme masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman di Tahun 2022 ini. Dimana lalu lintas provinsi itu akan diramaikan oleh lalu lalang pemudik menuju Jawa maupun Sumatera.

Oleh karena itu, Komisi III DPR RI mengimbau Kepolisian Daerah (Polda) Banten tetap mengutamakan pengamanan masyarakat selama mudik berlangsung. Apalagi di tengah kebijakan pemerintah pusat yang meniadakan larangan mudik di Tahun 2022 ini menyebabkan keinginan masyarakat untuk mudik meningkat, dimana sebelumnya sempat diperketat karena banyaknya kasus Covid-19.

“Dalam konteks itu, kepolisian sebagai institusi negara memiliki peran penting melakukan pengamanan dengan kesiapan sarana dan prasarana, serta yang terpenting memperhatikan keselamatan baik dalam perjalanan maupun dari resiko Covid-19,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa di Markas Polda Banten, Serang, Banten, Senin (11/4).

saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Banten tersebut, Desmond menekankan kepada pihak kepolisian dengan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya penyebaran kembali Covid-19. Supaya pengamanan kegiatan mudik tersebut dapat berlangsung dengan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Selain itu Desmond juga mengusulkan agar Polda Banten dapat menyiapkan fasilitas penunjang kalau terjadi kecelakaan. Seperti persiapan helikopter atau saran pendukung untuk melakukan penyelamatan di jalan raya selama mudik berlangsung. Adapun dalam pertemuan tersebut ia mengapresiasi paparan dari Polda Banten dan berharap eksekusi di lapangan dapat berjalan dengan baik.

“Ini kan rutinitas setiap tahun. Kalau dari paparan Polda Banten tentu sudah kasih gambaran kesiapannya. Bahwa kesiapannya diyakini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itulah kami datang setiap tahun ke sini (Polda Banten) dalam rangka evaluasi,” sebut Desmond. ■ aha



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat berfoto bersama jajaran Polda Banten. Foto: Agung/nvl





# Sidak ke Muara Baru, Komisi IV Desak Perbaiki Tata Kelola Limbah Kawasan Perikanan



Komisi IV DPR RI melakukan sidak ke Kawasan Industri Perikanan Muara Baru, Jakarta. Foto: Anne/nvl

**K**omisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja lapangan sekaligus inspeksi mendadak (sidak) ke Kawasan Industri Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memimpin langsung sidak bersama jajaran Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk melakukan penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang bermasalah.

Sidak yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pengaduan

masyarakat perihal bau amis dan limbah dari industri pengolahan ikan. Tim Komisi IV pun melakukan pengecekan saluran air yang berada di dalam kawasan. Kondisi air di dalam saluran air berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan beberapa saluran air ditutup dengan beton tebal untuk menghindari banjir.

“(Komisi IV) sengaja sidak ke lokasi ini karena ada pengaduan masyarakat bahwa ada perusahaan yang langsung membuang limbahnya ke saluran air, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, dari 180

tenant (penyewa) hanya 35 perusahaan yang ikut program menjadi satu dengan limbah ini,” ungkap Sudin saat ditemui *Parlementaria* di Muara Baru, Jakarta, Jumat (8/4).

Adapun fasilitas penampungan air limbah mandiri juga tak luput dari pantauan. Tim Komisi IV mendapati terdapat sejumlah perusahaan yang baru mengurus perizinan lingkungan dan membangun instalasi pengolahan air limbah mandiri. Padahal perusahaan tersebut telah beroperasi sejak lama. “Seluruh perusahaan ini wajib memasukkan limbahnya ke limbah, jangan malah dibuang ke laut, harus masuk ke limbah komunal,” imbuhnya.

Saat meninjau fasilitas instalasi pengolahan air limbah komunal yang berada di dalam lingkungan kawasan perikanan, Tim Komisi IV juga mendapati instalasi pengolahan air limbah tidak berfungsi secara maksimal. Air limbah yang diproses tidak bisa diluang ke laut karena kandungan-kandungan zat yang terlarut berada di atas baku mutu air limbah yang diperkenankan.

Tim Komisi IV kemudian mendapati persoalan lain, ditemukan adanya tumpang-tindih tata kelola kawasan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku otoritas pemerintah, dengan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) sebagai pengelola kawasan atau *developer*. “Ini kan tumpang tindih yang sekian puluh tahun belum terselesaikan dan tidak pernah ada yang mau menyelesaikan,” ungkap Sudin. ■ *ann/aha*

”

**SELURUH PERUSAHAAN INI WAJIB MEMASUKKAN LIMBAHNYA KE LIMBAH, JANGAN MALAH DIBUANG KE LAUT, HARUS MASUK KE LIMBAH KOMUNAL**

# Jelang Lebaran 2022, Komisi V Tinjau Infrastruktur dan Transportasi Mudik Lampung-Banten



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Foto: Arief/mvi

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, jelang Idulfitri tahun 2022 ini, dipastikan terdapat lonjakan pemudik, khususnya dalam simpul transportasi darat, laut, maupun udara. Mengingat tahun ini pemerintah telah memperbolehkan mudik dengan syarat sudah melakukan vaksin *booster*. Guna mengetahui kesiapan infrastruktur dan transportasi jelang Lebaran 2022, Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Lampung dan Banten.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, dari pihak BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) sudah melaksanakan antisipasi. Dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga sudah melakukan upaya maksimal. Dan dalam perjalanan mudik bahwa sebagian besar jalan-jalan tersebut sudah terantisipasi dengan baik dan diharapkan jalan ini bisa siap semua sebelum Lebaran ini,” kata Andi Iwan usai memimpin pertemuan Komisi V DPR RI dengan jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, ASDP, Angkasa Pura II, serta Basarnas, di Lampung, Kamis (7/4).

Terkait persyaratan mudik dari pemerintah yang menerapkan kebijakan harus vaksin *booster* dan

test PCR atau antigen bagi masyarakat yang belum *booster*, Andi Iwan meyakini akan adanya potensi lonjakan kasus. Sehingga untuk mereduksi risiko naiknya kasus Covid-19 pemerintah menerapkan vaksin *booster* atau PCR/antigen bagi yang belum *booster*. “Saya pikir kita dari Komisi V DPR RI mendukung hal tersebut agar masyarakat kita ini betul-betul bisa terhindar dari risiko Covid-19,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris BPJT Kementerian PUPR Triono Junoasmono menerangkan, untuk persiapan jalan tol menyambut arus mudik pihaknya sudah melakukan banyak perbaikan. “Kondisi jalan sudah membaik dan memang masih ada *spot-spot* yang akan kita selesaikan sampai H-15. Intinya kami dari Kementerian PUPR siap untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2022,” jelas Triono. ■

afr/sf

## Legislator Imbau Kemenhub-KAI Tambah Gerbong Kereta Mudik

**A**nggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengimbau Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersinergi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menambah jumlah gerbong rangkaian kereta api untuk mengakomodir perjalanan

arus mudik. Mengingat, animo masyarakat yang begitu tinggi untuk mudik tahun 2022 ini setelah kurang lebih hampir dua tahun lamanya tertunda efek situasi pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Novita di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi

**A**nggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat. Dalam kunjungan kali ini, Komisi V DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah *stakeholder* mitra kerja komisi serta meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) transportasi arus mudik Lebaran tahun 2022 di Bandara Internasional Minangkabau, Sumbar.

"Hari ini kami berkunjung Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat dalam rangka kita ingin melihat secara langsung bagaimana kesiapan para *stakeholder* pemangku kebijakan mengelola bandara dalam rangka menghadapi mudik lebaran di tahun 2022 ini," kata Bambang di sela-sela memimpin kunjungan ke Padang, Sumatera Barat, Kamis (7/4).

Menilik hasil survei dari Kementerian Perhubungan, kata Bambang, kurang lebih ada sekitar 79,4 juta jiwa akan melaksanakan mudik ke masing-masing daerahnya. Dari total tersebut sekitar 1,8 juta jiwa akan kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Dan dari jumlah 1,8 juta jiwa itu 75 persennya akan

## Komisi V Sambangi Bandara Minangkabau, Pantau Kesiapan Sarpras Hadapi Mudik Lebaran



Komisi V DPR RI meninjau kesiapan sarpras transportasi arus mudik Lebaran di Padang. Foto: Devi/nvi

menggunakan transportasi darat.

"Terkait hal itu tentu ini memerlukan kesiapan-kesiapan yang khusus dalam rangka bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik, keselamatan dan kenyamanan, serta tercapainya mudik sehat," sebut politisi Partai Golkar itu. Sementara dari paparan yang disampaikan para mitra kerja komisi,

seluruh pihak sudah memahami apa yang harus mereka kerjakan.

"Saya kira mereka sudah bisa mengantisipasi. Oleh karena itu saya berharap apa yang sudah disampaikan tadi benar-benar bisa diimplementasikan oleh *stakeholder* mitra kerja kami didalam menghadapi musim mudik lebaran ini," tutur Bambang. ■ dep/aha



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Foto: Puntho/nvi

dalam rangka meninjau persiapan sarana prasarana transportasi arus mudik Lebaran tahun 2022 ke Stasiun Balapan Solo, Bandara Adisumarmo dan Terminal Tirtanadi, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/4).

"Pengguna moda transportasi kereta api yang akan turun ataupun naik melalui Stasiun Balapan diprediksi akan berjumlah sekitar 19 kali lipat dari total jumlah penumpang Januari 2022. Hal ini harus menjadi perhatian dan fokus bagi PT KAI, Kemenhub, dan juga Pemerintah Kota Solo untuk menambah jumlah gerbong rangkaian kereta api dalam rangka sebagai langkah konkret mengantisipasi kepadatan penumpang guna mencegah penyebaran virus Covid-19 serta

demi keamanan dan keselamatan penumpang," ujar Novita.

Politisi Partai Gerindra itu lebih lanjut meminta PT KAI dan Ditjen Perkeretapiian Kemenhub secara rutin wajib cek memperhatikan kebersihan tiap-tiap gerbong-gerbong kereta wajib rutin dibersihkan demi kenyamanan dan kesehatan para penumpang. Selain itu, pinta Novita, setiap titik palang pintu kereta api harus dipastikan terjamin keamanannya sehingga dapat terhindari adanya kecelakaan dalam momen mudik tahun 2022 ini. Ke seluruh aspek tersebut betul-betul ditegaskan Novita wajib menjadi *concern* karena kereta api menjadi salah satu moda transportasi primadona masyarakat. ■ pun/aha



# Tinjau MRMP Subang, Komisi VI Cek Kebutuhan Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau Modern Rice Milling Plant (MRMP) Subang. Foto: Aisyah/nvl

negara (kepada Bulog). Yang menjadi salah satu program dari Rp2 triliun itu adalah menjadikan Bulog menjadi satu perusahaan yang modern dalam sistem pengadaan beras. Yang kita harapkan dengan adanya *Modern Rice Milling Plant* (MRMP) ini, Bulog tidak lagi punya alasan menampung gabah dari para tengkulak, tapi bisa memasok dari petani,” katanya usai memimpin Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau pengoperasian MRMP.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, setiap beroperasinya MRMP dapat menghasilkan beras 60 ton per harinya atau 6 ton per jam. Bima berharap dengan perubahan sistem perusahaan Bulog menjadi sistem yang modern dapat menyangga kebutuhan pangan nasional khususnya untuk komoditas beras, kedelai dan jagung.

“Dulu kelihatan gudang itu kumuh, bahkan gabah kering panen ke kering giling hanya ditumpuk. Namun sekarang prosesnya relatif tidak memakan tempat yang begitu besar dan bisa digunakan sebagai suatu proses produksi beras. Sehingga Bulog tidak hanya bisa menjamin sebagai *Public Service Obligation* (PSO), tetapi juga bisa berfungsi sebagai perusahaan modern yang berorientasi pada profit,” apresiasi Aria Bima. ■ a/s/sf

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau sentra penggilingan padi Bulog di Kecamatan

Tambakdahan, Subang, Jawa Barat, Rabu (6/4). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, dalam kunjungan ini ada dua poin penting yang menjadi perhatian. Poin pertama yakni terkait alur distribusi bahan pangan yang terganggu akibat perdagangan internasional, serta poin kedua yakni ketersediaan stok kebutuhan pangan dan harga pangan yang selalu naik saat Ramadan dan menjelang Idulfitri.

“Hari ini kita melihat hasil (alokasi anggaran) Rp2 triliun untuk hal-hal yang terkait dengan penyertaan modal

## Komisi VI Ingin Bulog Jadi Lembaga *Buffer Stock Policy*

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendapati bahwa sebenarnya komoditas beras di Kompleks Pergudangan Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya mencakup

dua atau tiga persen dari konsumsi nasional. Ia menginginkan agar Bulog dapat berperan kembali menjadi lembaga *buffer stock policy* yang dulu sebenarnya pernah berjalan.

“Komisi VI DPR RI ingin mengecek kesiapan Bulog sebagai salah satu

# Komisi VI Nilai Kesiapan ID Food Hadapi Ramadan Sangat Normatif

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai kesiapan  *Holding ID*

Food atau Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) saat memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran sangat normatif, di antaranya menyiapkan sapi sebanyak 3000 ekor. Hekal berharap kehadiran manajemen RNI yang baru, ditambah dengan diangkatnya Dirut RNI Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat memberikan solusi. Namun faktanya, saat ini RNI sendiri belum sepenuhnya fokus kepada industri gula.

Demikian disampaikan Hekal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau kesiapan  *Holding ID Food* saat menghadapi puasa dan Lebaran, di PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Jatitujuh), Desa Sumber, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa (5/4). Turut hadir Eselon

I Kementerian BUMN, Direktur Utama PT RNI (Persero), dan Direksi PT PG Rajawali II Unit Jatitujuh beserta jajarannya.

“Kita melihat jajaran manajemen Rajawali Nusantara Indonesia yang baru, mudah-mudahan bisa melakukan pembenahan dengan cepat. Melihat hal ini, bersamaan dengan bulan puasa, kita tidak ingin ada kejadian atau kasus seperti (kelangkaan dan mahalnya) minyak goreng (seperti) kemarin. Jangan sampai nanti ada kelangkaan gula, karena hari ini kita sudah datang dan melihat pabrik gulanya,” tegas Hekal.

Politisi Partai Gerindra itu menilai adanya masalah lahan tebu di PG Jatitujuh yang perlu diselesaikan. Ia pun ingin satu per satu bisa masalah

BUMN yang menjaga stabilitas atau ketersediaan pangan khususnya di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri nanti. Kita membutuhkan peran dari lembaga  *buffer stock policy* yang dulu sebenarnya dijalankan oleh Bulog, karena saat ini kita menghadapi tantangan negara yang kelihatannya kurang bisa untuk pengendalian harga, seperti di minyak goreng dan juga di komoditas lainnya,” kata Martin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Kompleks Pergudangan Bulog, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/4).

Politisi Partai Nasdem itu meminta kepada Direksi Bulog untuk mengevaluasi peran-peran seperti

apa yang sudah dijalankan sekarang dan apa yang masih belum maksimal. Komisi VI DPR RI pun memiliki aspirasi terkait ketersediaan pangan dan akan membahas lembaga  *buffer stock policy* tersebut yakni peran Bulog yang seperti dulu serta akan  *me-review* peran Bulog di masa depan.

Sebelumnya Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan bahwa tahun 2021 Bulog sudah menyerap 1,2 juta ton beras kemudian di tahun 2022 baru menyerap 73.000 ton beras dengan alasan karena memang belum masuk masa panen dan yang kedua harga gabah kering panen di petani masih tinggi yakni Rp4.700 per kilogram. ■ cas/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Foto: Dipa/rvi

bisa diselesaikan dengan cepat. “Nampaknya di sini juga masih menyelesaikan masalah lahan. Selain itu, kita juga perlu tingkatkan kinerja daripada hasil tanam tebunya. Melihat fokus dari RNI ini kan pada industri gula. Intinya, masalah lahan menjadi PR yang berat dan kita kasih kesempatan pada dirut yang baru untuk segera menyelesaikan masalah ini,” tutur Hekal menutup pernyataannya. ■ dip/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Dipa/rvi

# Komisi VII: Aktivitas Tambang Dilarang Merugikan Negara

**D**emi mengawal sekaligus mengawasi penerapan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sesuai konstitusi, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto memperingatkan agar aktivitas pertambangan SDA tidak boleh merugikan negara.

Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis (7/4). Ia menekankan penguasaan konsesi besar tanpa menjalankan tanggung jawab kepada negara bisa menimbulkan disparitas penguasaan aset yang disertai konflik.

“Meskipun (PT Sorikmas Mining) telah melakukan eksplorasi dengan konsesi yang cukup luas di atas 20.000 (hektare), kami khawatir ini akan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Jadi, kami ingin kuasa tambang segera berproduksi sesuai dengan ketentuan sehingga tidak menimbulkan disparitas aset dan konflik,” terang Sugeng.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu pun menjelaskan jika lahan yang sudah dikuasakan itu tidak segera berproduksi, menurutnya, hal tersebut akan memperbesar indeks gini dan rasio penguasaan tanah yang semakin jomplang. Oleh karena itu, redistribusi aset perlu dilakukan.

Turut didampingi oleh Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P Pandjaitan dan

Dirjen Minerba KESDM Ridwan Djamaludin, Sugeng juga menyoroti penambangan liar di sekitar PT Sorikmas Mining. Ia menyampaikan agar Polres Mandailing Natal segera menginvestigasi lebih lanjut.

“Jika dikuantifikasi, (penambangan liar) besarnya juga skalanya karena ada yang menampung, ada bandarnya. Sehingga bersama Komisi III, kami betul-betul mencari tahu. Kami pun juga berdialog dengan penegak hukum dalam hal ini Kapolres Mandailing Natal,” tuturnya.

■ ts/aha



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI. Foto: Saumi/nvl

## Komisi VII Nilai Kesiapan Pertamina dan PLN Sulawesi Jelang Lebaran Cukup Baik

**M**enjelang Hari Raya Idulfitri 1443 H selalu dibarengi dengan meningkatnya kegiatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas maupun listrik. Untuk itu Komisi VII DPR RI melalui fungsi pengawasannya ingin memastikan pasokan tersebut dapat tercukupi jelang dan selama Lebaran.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai persiapan Pertamina dan PLN dalam menghadapi lebaran untuk wilayah Sulawesi secara keseluruhan sudah cukup baik. “Kami sudah memonitor tadi melalui *command center* PLN, kami sudah mendapatkan pemaparan dari Direktur Pertamina tentang kesiapan Pertamina dan diyakinkan bahwa Pertamina telah siap baik dari



# Komisi VII Pastikan Kesiapan TBBM Pertamina Cikampek Hadapi Mudik Lebaran 2022

Komisi VII DPR RI menggelar pertemuan dengan jajaran PT Pertamina (Persero) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Cikampek, Jawa Barat, Kamis (7/4). Kunjungan ini ntuk memastikan kesiapan PT Pertamina Regional Jawa bagian barat menyediakan dan mendistribusikan BBM, dalam menghadapi arus mudik Lebaran Idulfitri 1443H.

**P**emerintah secara resmi memperbolehkan mudik Lebaran tahun ini dengan sejumlah catatan, di antaranya harus sudah menerima vaksin *booster* atau dosis ketiga. Dengan adanya kebijakan tersebut, muncul antusiasme masyarakat dan sejumlah konsekuensi. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengatakan, konsekuensi logis dari hal ini adalah peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) gas maupun listrik menjelang Hari Raya Idulfitri.

Demikian diungkapkan Dony saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin Kunsepek Komisi VII DPR RI ke TBBM Cikampek, Jawa Barat. Foto: Rizki/nvl

Selain peningkatan konsumsi BBM, politisi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan dampak antusiasme masyarakat untuk mudik tahun ini berpotensi mengulang insiden tragis yang terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur, Jawa Tengah, dan dikenal dengan

Brexit (Brebes Exit) pada bulan Juli 2016 lalu, dimana kemacetan total yang terjadi selama lebih dari 20 jam itu hingga menyebabkan 17 orang meninggal dunia.

Mengingat kejadian itu, Dony menilai bahwa lancarnya ketersediaan BBM bagi arus kendaraan yang lewat, bisa jadi langkah untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang kembali. Terkait hal itu, ia mengungkapkan TBBM Cikampek memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan BBM bagi para pemudik, terutama pengguna ruas tol Cikampek serta sejumlah ruas tol yang terkenal rawan macet.

“Terminal bahan bakar minyak atau BBM di Cikampek memegang peran yang sangat strategis dalam menjamin ketersediaan BBM bagi kendaraan yang melintang di sepanjang wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, dan Bekasi. Menurut catatan beberapa ruas jalan tol yang ada di sekitar Cikampek itu tergolong jalur rawan macet,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI itu. ■ rr/sf



Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno. Foto: Bianca/nvl

aspek BBM, ketersediaan, maupun distribusinya,” terangnya usai kunker di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/4).

Meski secara keseluruhan dinilai sudah siap, Eddy mengatakan Komisi VII

akan terus memantau perkembangan kesiapan menjelang hari raya melalui rapat dengar pendapat dan pemantauan Anggota DPR di masing-masing dapil. “Meskipun nanti kondisi reses, tetapi masing-masing anggota yang nanti akan kembali ke dapilnya itu akan bisa memberikan hasil pandangan laporan kepada Pertamina dan PLN jika memang ada kendala di lapangan,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, tim juga meninjau langsung *command center* PLN Makassar dan salah satu SPBU di jalan Dr. Sam Ratulangi Makassar. Berbagai hal yang dilihat adalah bagaimana PLN mengantisipasi kendala kelistrikan dan merespon cepat kendala tersebut, serta bagaimana respon masyarakat imbas dari naiknya harga Pertamax serta bagaimana ketersediaan solar di SPBU-SPBU utamanya SPBU yang berada di jalan-jalan antar kota. ■ bia/aha

# Komisi IX Sidak ke Pasar Tambakrejo, Temukan Makanan Mengandung Zat Berbahaya



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI saat melakukan sidak di Pasar Tambakrejo, Surabaya. Foto: Andri/nvl

dan ikan yang mengandung formalin, boraks serta jenis zat kimia lain yang berbahaya. Untuk itu Komisi IX DPR RI berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan BPOM dan instansi terkait, guna meminimalisir zat kimia berbahaya yang digunakan ke makanan.

Bila perlu, kata Charles, selain dilakukan sidak dan pemantauan, tetap diberikan edukasi kepada para pedagang akan bahaya penggunaan zat kimia berbahaya dalam makanan. “Jadi kami berharap BPOM dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan penggunaan zat kimia berbahaya dalam penggunaan makanan yang di jual di pasar ini maupun pasar-pasar di seluruh Indonesia,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu. ■ man/aha

**K**omisi IX DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tambakrejo Surabaya dalam rangka pengawasan peredaran makanan dan minuman di bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri. Sidak yang merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilakukan demi mengantisipasi peredaran dan penggunaan zat berbahaya pada makanan.

“Dari sejumlah sampel yang diambil, makanan dan ikan di Pasar Tambakrejo Surabaya ada beberapa sampel yang mengandung zat kimia berbahaya,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris usai sidak di Pasar Tambakrejo bersama Kepala Balai Besar POM Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (7/4). Saat sidak, pihaknya membeli makanan yang dicurigai mengandung zat kimia berbahaya, seperti kerupuk, cendol, kue, dan ikan.

Setelah dites beberapa sampel yang dibeli terdapat beberapa makanan

## Terima Laporan BBPOM Yogyakarta, Komisi IX Awasi Peredaran Makanan di Bulan Ramadan

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengawasan peredaran makanan dan minuman di Bulan Ramadan dan jelang

Lebaran. Supaya masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, dan bergizi.

Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beserta Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia harus meningkatkan pengawasan khusus



# BPOM Harus Jamin Peredaran Makanan yang Sehat dan Bergizi

**S**udah menjadi tradisi setiap kali datang bulan Ramadan dibarengi dengan kemunculan beragam aneka jajanan makanan, kebiasaan ini semata-mata untuk membuat ibadah puasa menjadi bergairah. Hal ini menjadi penyebab meningkatnya minat dan daya beli masyarakat pada makanan dan bahan pokok. Atas dasar itu, Komisi IX DPR RI ingin memastikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawalan dan menjamin peredaran makanan di bulan puasa ini tidak berisiko pada kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh pun memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera Barat dalam rangka pengawasan peredaran makanan dan minuman pada bulan Ramadan. Komisi IX berharap agar

BPOM menjamin peredaran makanan yang sehat dan bergizi. "Semoga dalam kunjungan kami kali ini tidak ditemukan makanan yang mengandung zat kimia dan sudah kedaluwarsa yang tidak bagus dikonsumsi oleh tubuh," harap Ninik, sapaan akrab Nihayatul saat berkunjung ke BPOM Padang, Sumatera Barat, Kamis (7/4).

Pada kunjungan kali ini, Komisi IX DPR RI akan menghasilkan rekomendasi kepada mitra kerja, terutama BPOM RI untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, dan bergizi. Komisi IX DPR RI juga berharap agar Badan POM beserta Balai POM di seluruh Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap pangan jajanan berbuka puasa, agar terhindar dari bahan berbahaya.

Intensifikasi pengawasan ini dilakukan secara terpadu dan sinergis bersama lintas sektor.

Kunjungan ini diikuti sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI, di antaranya Darul Siska (Fraksi Golkar), Harvey B Malaiholo (Fraksi PDI-Perjuangan), Rahmat Handoyo (Fraksi PDI-Perjuangan), Wenny Haryanto (Fraksi Golkar), Ade Rezki Pratama (Fraksi Gerindra), Syuir Syam (Fraksi Gerindra), Nurhadi (Fraksi Nasdem), dan Arzeti Bilbina (Fraksi PKB). Turut mendampingi, Direktur Pengawasan peredaran Pangan Olahan Ratna Irawati dan Deputi Wilayah Sumbarteng Jambi BPJS Kesehatan Eddy Sulistihanto Hadie.

■ eko/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.  
Foto: Eko/nvl



terkait pembelian jenis-jenis produk pangan yang biasa digunakan di Hari Raya Idulfitri. Termasuk pangan jajanan berbuka puasa atau takjil yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya.

Wakil Ketua  
Komisi IX DPR RI  
Abidin Fikri.  
Foto: Novel/nvl

Berkaitan dengan pengawasan pangan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri memastikan makanan takjil di Yogyakarta aman yaitu tidak mengandung bahan berbahaya. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemaparan Balai Besar POM (BBPOM) Yogyakarta yang telah melaksanakan pengawasan pangan takjil di pusat takjil Jogokaryan, Kota Yogyakarta dan di Purwomartani, Kabupaten Sleman.

Dimana terdapat 29 sampel dengan hasil memenuhi syarat, tidak mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rhodamin B dan methanyl yellow. "Untuk keseluruhan dari BBPOM Jogja sudah melakukan pengawasan ke titik sentra makanan takjil, ternyata dari sampel yang diambil

menyatakan bahwa takjil yang beredar di Yogyakarta dalam kondisi aman, tidak ada masalah," jelas Abidin usai memimpin pertemuan di Kantor Balai Besar POM Yogyakarta, Kamis (7/4).

Di sisi lain, mengingat Yogyakarta sebagai daerah wisata juga 'Kota Kuliner' yang mempunyai keanekaragaman makanan khas. Politisi PDI-Perjuangan ini menginginkan makanan kuliner dan oleh-oleh Yogyakarta juga diperhatikan keamanannya agar layak dikonsumsi. Tentunya dengan hal itu bisa memberikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan daya beli pada sektor UMKM maupun UKM makanan di Yogyakarta. ■ nv/aha



# Komisi X Tekankan Pentingnya Akurasi Data dalam Seleksi Guru PPPK

**P**rogram 1 Juta Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan. Program tersebut dianggap sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu beberapa perbaikan di antaranya masalah akurasi data.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan agar

pemerintah mengevaluasi yang digunakan ketika melakukan seleksi Guru PPPK. Pemerintah pusat perlu berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah terkait hal apa saja yang menjadi kebutuhan dalam seleksi PPPK, apalagi terkait permasalahan formasi.

Hal tersebut disampaikan Hetifah usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina beserta jajaran

Wakil Ketua  
Komisi X DPR RI  
Hetifah Sjaifudian.  
Foto: Erman/nvl



# Komisi X Pertanyakan Keseriusan Rekrutmen Guru Honorer di Langkat

**A**nggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan rekrutmen guru honorer di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sebab, menurutnya, Komisi X DPR RI telah memperjuangkan agar Kabupaten Langkat mendapatkan jatah pengangkatan guru honorer sebanyak 2.500 orang. Namun,

yang lulus tes guru honorer menjadi berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat hanya 2-3 orang.

“Karena itu, kita kecewa. Pada tes pertama saja banyak yang ikut tapi hanya dua-tiga yang lulus. Nah, ini artinya tidak seriusnya di mana? Kita minta semuanya serius,” ujar Djohar saat menjadi pemimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke

Kabupaten Langkat dalam rangka pengawasan Formasi GTK-PPPK dan Kurikulum Prototipe/Merdeka Belajar, di Langkat, Sumut, Jumat (8/4).

Diketahui, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dua di antaranya adalah kebijakan Program 1 Juta Guru PPPK dan Episode 15 Merdeka Belajar: Kurikulum Merdeka. Program yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan guru ini dalam implementasinya menemukan banyak kendala.

Sehingga, Djohar berharap seperti awal perjanjian Komisi X dengan pemerintah bahwa guru honorer ini sudah berpuluh-puluh tahun mengabdikan untuk menghasilkan orang-orang terbaik di negeri ini. “Mereka hanya perlu formalitas saja ikut tes itu sesuai dengan UU. Tapi

di Kantor Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (8/4). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh para *stakeholder* bidang pendidikan se-Banjarmasin.

“Akurasi data itu penting. Apalagi terkait seperti formasi. Misalnya tadi Guru Bahasa Inggris, Guru PAUD, mereka yang sudah lulus berharap mendapatkan formasi itu. Tapi ini tentu nanti akhirnya bergantung dengan pemerintah daerah yang juga harus pro aktif mengajukan formasi yang dimaksud kepada pemerintah pusat,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Hetifah menyampaikan, Komisi X DPR RI sudah meminta agar di Tahun 2022 ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) betul-betul memastikan bahwa para Guru PPPK yang lulus *passing grade*, akan mendapatkan formasi sesuai dengan bidangnya. “Ini butuh kerja sama dengan pemerintah daerah, agar formasi yang memang dibutuhkan itu diajukan,” tegasnya. ■ es/aha

## Komisi X Serap Masukan Terkait GTK PPPK di Makassar



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Makassar. Foto: Hira/nvl

**K**omisi X DPR RI menerima beberapa masukan terkait Guru dan Tenaga Kependidikan-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GTK-PPPK) di Makassar, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berharap dengan kunjungan yang dilakukan Komisi X DPR RI ke Sulsel ini, tercipta sinergi antar berbagai pihak, sehingga kekosongan-kekosongan dalam permasalahan GTK-PPPK dapat terselesaikan.

“Ada beberapa masukan, seperti misalnya keluhan bahwa ternyata, cuma ini bukan mitra Komisi X ya. Dari Kementerian Agama, misalnya tadi (ada formasi guru) kosong. Jadi formasi guru agama, ini guru agama mau Islam, non-Islam, ternyata kosong,” ujar Fikri di sela-sela memimpin pertemuan Tim

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan pihak-pihak terkait di Makassar, Sulsel, Jumat (8/4).

Politisi PKS ini bersyukur di Makassar terdapat program Laskar Pelangi (Laskar Pelayanan Publik Berintegritas) yang menjadi salah satu solusi dari kekosongan dalam penempatan guru. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa daerah tidak hanya sekedar menunggu, namun juga mencoba menyelesaikan persoalan dengan solusi yang bersifat lokal.

“Ini saya kira bisa ada (diterapkan) seperti ini. jadi harus secara nasional, harus kita hormat. Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga datang kan. Saya kira kita akan menyampaikan tetapi yang bersangkutan juga ada di sini, sehingga nanti kita sinergi untuk supaya formasi yang kosong itu harus diadakan,” lanjut Fikri. ■ hal/sf



Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin I. Foto: Ridwan/nvl

tidak harus lagi segala macam hal yang memberatkan mereka. Sehingga banyak dari mereka yang kecewa,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini. ■ rdn/sf

# Komisi XI Pantau Kesiapan Daerah Hadapi Ramadan dan Lebaran



dana tunai oleh masyarakat yang terus meningkat dari hari biasanya. Kebutuhan akan dana tunai tersebut biasanya diperoleh melalui bank atau ke Pegadaian untuk mendapatkan dana tunai tersebut secara mudah dan aman,” jelas Hatari pada pertemuan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/4).  
Politisi Partai NasDem

tersebut menambahkan, masyarakat pun dituntut untuk lebih cerdas dalam melihat fenomena kenaikan inflasi yang terjadi secara musiman setiap tahunnya saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Berbagai langkah antisipasi dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi beban karena naiknya harga kebutuhan pokok. Berdasarkan Laporan Perekonomian Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada Februari 2022 bahwa inflasi Jawa Tengah pada triwulan I 2022 diperkirakan masih akan meningkat.

“Menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah serta *stakeholder* untuk melindungi masyarakat dari inflasi serta terpenuhinya uang rupiah terutama saat Ramadan dan Idulfitri agar daya beli masyarakat tidak menurun. Ke depan, orkestrasi kebijakan strategis antar *stakeholders* di Jawa Tengah harus terus dilakukan dan dipercepat sehingga akselerasi kebijakan yang dirumuskan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian secara keseluruhan di tahun 2022 dan kebermanfaatannya untuk masyarakat dan sektor usaha lainnya,” harap Hatari. ■sf

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto: Sofyan/rw1

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad

Hatari menggelar pertemuan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan Bank Jateng, dalam rangka memantau kesiapan daerah dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2022.

“Tren setiap bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri salah satunya terkait dengan inflasi, kenaikan harga di pasaran dan permintaan ketersediaan

## Jelang Idulfitri 2022, Komisi XI Soroti Fasilitas Penukaran Uang hingga Bahaya Pinjol Ilegal

**U**ntuk memenuhi kebutuhan penukaran uang tunai menjelang Hari Raya Idulfitri 2022, Bank Indonesia (BI) telah membuka 5.013 titik penukaran uang di perbankan seluruh Indonesia. Selain itu, BI juga

menyediakan layanan penukaran uang melalui Mobil Kas Keliling BI.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau BI untuk gencarkan sosialisasi fasilitas penukaran uang tunai. Menurutnya



**S**elama Ramadan dan jelang Idulfitri berbagai harga komoditas merambat naik sebagai tren musiman.

Maka dari itu diharapkan kenaikan harga komoditas tersebut tidak menimbulkan inflasi yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.

Harapan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo saat memimpin pertemuan Komisi XI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Jumat (8/4).

“Apabila inflasi dapat terjaga, maka akan mempunyai pengaruh terhadap daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian lebih baik lagi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri,” urai Andreas. Untuk itu, demi mendukung perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting menjaga tingkat inflasi pada level yang terjaga.

“Terkait inflasi, BI bersama instansi lainnya telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah

## Komisi XI: Inflasi yang Terjaga di Yogyakarta Mampu Pertahankan Daya Beli



Foto bersama Tim Kunspek Komisi XI DPR RI di Yogyakarta. Foto: Husen/nvi

(TPID) di daerah-daerah termasuk di Provinsi DI Yogyakarta. Pada bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri tentu TPID harus bisa menunjukkan perannya mengingat pada momentum

ini biasanya terjadi kenaikan harga-harga di masyarakat yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli,” tutur politisi PDI-Perjuangan ini lebih lanjut. ■ mh/aha



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Taufan/nvi

BI dan pihak perbankan yang terlibat, termasuk Bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan Bank BJB perlu mensosialisasikan secara lebih luas, seperti soal lokasi penukaran uang, persyaratannya, serta kuotanya per hari kepada masyarakat.

“Dengan kejelasan dan kemudahan ini, masyarakat pastinya akan lebih memilih untuk menukarkan uangnya ke lembaga formal, bukan menukarkan di sembarang tempat yang rawan pemalsuan,” ujar Puteri dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, Jumat (8/4).

Lebih lanjut, Puteri juga mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan akses

pembiayaan bagi pelaku UMKM. Karena sampai triwulan IV-2021, penyaluran kredit di Jawa Barat masih didominasi kredit non-UMKM sebesar 77,91 persen, sementara porsi kredit UMKM hanya 22 persen.

“Saya cukup puas karena penyaluran kredit UMKM dapil saya berkontribusi cukup besar dari total penyaluran kredit UMKM di Jawa Barat dibanding daerah lain. Yaitu, dari Kabupaten Bekasi mencapai 8,84 persen dan Kabupaten Karawang sebesar 4,80 persen. Sayangnya, penyaluran kredit Kabupaten Purwakarta masih rendah. Padahal, Kabupaten Purwakarta juga memiliki aneka UMKM potensial yang perlu dukungan modal,” urai Puteri. ■ tn/aha

# BKSAP Sosialisasi Program SDGs di NTB

**B**adan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mensosialisasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada kesempatan tersebut Pimpinan BKSAP menjelaskan Program SDGs merupakan komitmen global, komitmen dari semua negara termasuk juga komitmen sebagai bangsa. Dan tentu juga komitmen di provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Pencapaian SDGs merupakan komitmen dari semua pihak agar bisa berhasil

dalam pencapaian target.

“Agar apa yang menjadi *tagline* ‘*no one is left behind*’ (tidak ada seorangpun yang tertinggal) bisa menjadi wujud nyata. Oleh karena itu itu semua harus menjadi usaha bersama dalam mencapai target (SDGs) tersebut,” jelas Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon usai memimpin pertemuan BKSAP DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, pemerintah daerah, dan perwakilan mahasiswa Universitas Mataram, di

Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, NTB, Jumat (8/4).

Fadli mengatakan, dari pertemuan ini banyak masukan-masukan yang didapat BKSAP terkait isu terkait program berkelanjutan. Di antaranya, mengenai pendidikan dimana di NTB belum ada kesetaraan dalam bidang pendidikan. “Untuk itu lambat laun kita harus membuat sebuah *partnership* dengan institusi-institusi baik di dalam maupun luar negeri. Dilihat di sini Universitas Mataram yang terdepan di NTB yang sudah menerima bantuan mahasiswa asing. Mungkin untuk ke depannya bisa bekerjasama dengan negara-negara lain yang mempunyai akses lebih luas pada sumber-sumber pengetahuan, sains, data dan lainnya,” pungkas Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu juga menilai bahwa dengan adanya *partnership* dinilai penting di dalam pendidikan, yakni untuk memajukan pendidikan. Saat ini sudah ada hubungan kerja sama antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi di negara-negara lain. “Dengan adanya hubungan kerja sama dan *partnership* yang baik, kita bisa bantu mendorong untuk menjembatani supaya institusi kita bisa lebih global, dan bisa kompetitif di dunia internasional,” harap legislator dapil Jawa Barat V tersebut. ■ rmi/sf

Ketua BKSAP DPR RI  
Fadli Zon. Foto: Rumi/nvl





Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah saat memimpin pertemuan dengan manajemen RS Mayapada. Foto: Ria/nvl

# BURT Pantau Layanan RS *Provider* Jamkestama di Tangerang

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah memimpin Tim Kunjungan Kerja BURT ke Provinsi Banten dalam rangka meninjau pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya yang dilaksanakan Rumah Sakit Mayapada di Kota Tangerang sebagai rumah sakit *provider* Asuransi Jasindo.

Dimiyati menjelaskan, peran dan tugas BURT meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kebijakan kerumahtangaan, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

hak-hak Anggota DPR. "Dalam konteks kunjungan kerja ini adalah melakukan pengawasan terhadap rumah sakit *provider* dari Asuransi Jasindo sebagai pelaksana program Jamkestama untuk Anggota DPR beserta keluarganya," ungkapnya saat memimpin pertemuan dengan manajemen RS Mayapada di Tangerang, Banten, Kamis (7/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja BURT DPR RI adalah untuk memastikan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya yang dilaksanakan oleh RS *provider* Asuransi Jasindo telah sesuai dengan ketentuan/peraturan.

BURT menyoroti beberapa ketentuan pelayanan yang dimulai dari kedatangan sampai kepulangan pasien, *database* dan rekam medis terbaru seluruh Anggota DPR RI dan keluarganya, ketersediaan dan jumlah ruang VVIP dan dokter spesialis, kelengkapan alat kesehatan dan laboratorium, kelancaran proses dan ketepatan waktu penagihan dari RS *provider* kepada Asuransi Jasindo, serta kesiapan RS dalam memberikan layanan *medical check up* (MCU).

"Setelah mendengar pemaparan, kami rasa RS ini cukup representatif. Saya *men-support* RS Mayapada semakin baju dan modern," jelas Dimiyati.

Senada, Anggota BURT DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diberikan RS Mayapada Tangerang kepada Anggota DPR RI yang dinilai sangat baik. Namun, menurutnya ada beberapa fasilitas yang perlu untuk ditingkatkan serta informasi terkait pelayanan yang perlu dimasifkan kepada Anggota DPR. "Pelayanan di sini sudah sangat bagus. Saya memberikan saran agar RS ini ramah anak, mengingat wakil rakyat periode ini banyak diisi oleh anak muda yang masih produktif," kata politisi Partai Golkar itu. ■ rnm/sf





**SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



**RACHMAT GOBEL**  
WANAL, KETUA DPR RI  
REDAKSI KORPRIKAM



**LODEWIJK F. PAULUS**  
WANAL, KETUA DPR RI  
REDAKSI KORPRIKAM



**PUAN MAHARANI**  
KETUA DPR RI



**SUFMI DASCO AHMAD**  
WANAL, KETUA DPR RI  
REDAKSI KORPRIKAM



**A. MUHAIMIN ISKANDAR**  
WANAL, KETUA DPR RI  
REDAKSI KORPRIKAM

**MENGUCAPKAN :  
SELAMAT MEMPERINGATI**

**KENAIKAN ISA  
AL MASIH**